

PENINGKATAN AKSES MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Elfira Zafitri¹, Mutiara², Wahida Asni³, Rizki Ananda⁴
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,
Kota Bangkinang, Provinsi Riau^{1,2,3}
elfirazafitri@gmail.com¹, mutyara248@gmail.com², wahidaasni@gmail.com³,
rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴

ABSTRACT

This research investigates improving access, quality and equity in education. Given the urgency of equalizing access and equalizing the quality of education, the government has implemented an education zoning policy. The zoning-based policy is one of the right policies for equalizing access and quality of education because the principle is to bring education services closer to the community and equalize the quality of education. With this policy, it is expected to be able to equalize education. Therefore, equal access, quality and equitable distribution of education are very important because education can produce a society that is ready to face any conditions and conditions.

Keywords: improving access, quality, equity of education

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki tentang peningkatan akses, mutu dan pemerataan pendidikan. Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Kebijakan berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu melakukan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu pemerataan akses, mutu dan pemerataan pendidikan sangatlah penting dilakukan karena dengan pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan mampu bersaing dengan negara lain.

Kata Kunci: peningkatan akses, mutu, pemerataan pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah elemen penting dalam penyempurnaan individu dalam masyarakat yang

berbudaya. Di era globalisasi saat ini, banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa lepas dari dampak globalisasi

yang telah merasuki setiap aspek kehidupan modern (Tilaar, 2003).

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan bagi kemajuan bangsa Indonesia, karena merupakan landasan pembangunan. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi sistem pendidikan bangsa guna mendorong tumbuhnya kecerdasan masyarakat (Hakim, 2016).

Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah menyadari perlunya peningkatan kapasitas intelektual warga negaranya. Konstitusi Republik Indonesia lebih jauh menggarisbawahi prinsip ini dengan menjamin hak setiap individu atas pendidikan pada Pasal 31. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang diatur secara hukum. Menanggapi kewajiban konstitusional tersebut, pemerintah berkomitmen untuk membentuk lembaga yang didedikasikan untuk memajukan pembangunan intelektual bangsa.

UUD 1945 menekankan bahwa pendidikan nasional harus dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang saja. Memberikan pendidikan hanya kepada kelompok minoritas yang memiliki hak istimewa bertentangan dengan prinsip-prinsip Konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Sistem pendidikan demokratis sangat penting dalam membentuk masyarakat demokratis, karena sistem tersebut mengakui dan menghormati keragaman kecerdasan manusia. Hal ini bertujuan untuk menawarkan kesempatan yang sama bagi individu untuk menerima pendidikan berkualitas berdasarkan kemampuan dan bakat mereka (Hakim, 2016).

Dunia pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak tantangan dan keberhasilan, dengan berbagai permasalahan yang ada saat ini yang menjadi hambatan terbesar dalam mencapai keunggulan dalam pendidikan. Permasalahan-permasalahan ini merupakan inti dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga memerlukan perhatian segera dari warga negaranya. Kualitas individu yang dihasilkan sangat bergantung

pada kualitas pendidikan yang diberikan. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam dua bidang utama: tantangan yang berskala lebih besar, seperti kurikulum yang berbelit-belit dan berbelit-belit, kesenjangan dalam kesempatan pendidikan, dilema penempatan guru, kualitas guru yang di bawah standar, dan biaya pendidikan yang mahal; dan skala yang lebih kecil, termasuk metode pengajaran yang monoton, fasilitas yang tidak memadai, dan kinerja siswa yang kurang memuaskan (Ginting et al., 2022).

Dalam masyarakat kita, pendidikan harus dapat diakses secara merata oleh individu dari semua etnis, agama, dan kelompok sosial. Upaya mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan mencakup dua komponen penting: pertama, jaminan persamaan kesempatan bagi semua individu untuk memperoleh pendidikan, memastikan bahwa akses terhadap pembelajaran tersedia bagi setiap penduduk usia sekolah. Kedua, prinsip keadilan dalam perolehan pendidikan.

Dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan, terlihat jelas

bahwa lembaga-lembaga pendidikan di pusat kota memiliki fasilitas dan infrastruktur yang canggih, sementara lembaga-lembaga pendidikan di pedesaan atau daerah terpencil sering kali hanya mengandalkan sumber daya yang minim atau kekurangan staf pengajar. Meskipun penting, sumber daya fisik ini bukanlah satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Pengelolaan fasilitas sekolah yang efektif dapat meningkatkan pengalaman belajar secara signifikan. Pentingnya mengatasi kesenjangan ini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, namun juga di wilayah perkotaan dimana sistem pendidikan masih tidak merata.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sangat penting untuk memprioritaskan peningkatan akses terhadap pendidikan untuk semua demografi, sehingga dapat membina masyarakat yang berkembang. Meskipun terdapat kemajuan dalam desentralisasi dan otonomi pendidikan, pengelolaan layanan pendidikan yang lebih sederhana dan efisien masih diperlukan. Jelas terlihat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mendukung inisiatif kebijakan yang bertujuan

meningkatkan akses terhadap pendidikan, karena siswa yang terpinggirkan masih belum menerima tingkat pendidikan yang layak mereka dapatkan (Yusup et al., 2019).

Sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan pendidikan dengan berfokus pada komunitas yang terpinggirkan dan terpencil. Meskipun pemerintah telah lama berupaya untuk mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan melalui berbagai program yang dimulai sejak tahun 1884, termasuk pendidikan wajib dan peluang beasiswa, masih banyak hal yang perlu dilakukan. Dengan meningkatkan dukungan dan sumber daya pendidikan di bidang-bidang yang kurang terlayani ini, kami dapat memastikan bahwa semua individu memiliki peluang untuk berkembang dan sukses.

Inisiatif pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan dicontohkan melalui penerapan sistem zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang dikenal dengan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini mengutamakan kedekatan antara tempat tinggal

siswa dan sekolah, sehingga memastikan bahwa mereka yang tinggal lebih dekat memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkualitas. Dengan membina kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga, kebijakan ini berupaya mempercepat penyelenggaraan pendidikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pendidikan. Prinsip yang mendasari PPDB zonasi adalah memastikan anak dapat mengakses layanan pendidikan dekat dengan tempat tinggalnya. Jika satu zona mencapai kapasitasnya, Dinas Pendidikan diberi mandat untuk mencari sekolah tambahan atau membuka sekolah baru untuk menampung semua siswa (Risna et al., 2020).

Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan pendekatan strategis untuk mendorong pemerataan pendidikan dengan memastikan kedekatan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, kebijakan ini juga secara tidak

sengaja membatasi keberagaman dan pilihan dalam pendidikan. Sistem yang ada saat ini sering kali membatasi siswa untuk bersekolah di lingkungan sekitar mereka, sehingga menyebabkan terbatasnya pilihan bagi mereka yang mungkin lebih cocok untuk bersekolah di luar zona yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan siswa berbakat terpaksa bersekolah di sekolah yang kurang diminati hanya karena lokasinya, sehingga menyebabkan kurangnya keragaman dalam kesempatan pendidikan. Terlepas dari tujuannya, sistem zonasi menghadirkan tantangan yang perlu diatasi demi sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Artikel ini dengan cermat mengevaluasi berbagai sudut pandang mengenai topik kontroversial, skenario rumit, dan kebijakan kontroversial. Dengan menggunakan analisis tinjauan pustaka yang menyeluruh, penelitian ini menggali analisis korelasi publikasi ilmiah dalam wacana yang dipilih dengan kemahiran dan ketepatan. Metodologi penelitian mencakup pemilihan artikel yang

cermat, pengumpulan data awal, penelusuran hambatan, pengumpulan data tambahan, dan perumusan kesimpulan dan rekomendasi yang mendalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di tingkat pendidikan formal, isu perluasan akses dan peningkatan kesetaraan pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan. Sayangnya, anak berkebutuhan khusus seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas, termasuk kesempatan belajar dasar. Anak-anak ini mencakup beragam individu dengan perbedaan fisik, emosional, mental, sosial, dan intelektual.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak mewakili masa depan bangsa kita, oleh karena itu penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan jaminan akses pendidikan bagi semua anak. Kesejahteraan dan kesuksesan masa depan anak-anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari permasalahan sistemik seperti kemiskinan dan perencanaan kota yang tidak memadai, hingga

tantangan yang lebih bersifat pribadi seperti kurikulum pendidikan yang ketinggalan jaman dan ketidakadilan sosial. Perlindungan hak-hak anak merupakan upaya kolektif yang memerlukan keterlibatan individu di semua lapisan masyarakat (Maidin Gultom, 2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan dalam menegakkan hak-hak anak-anak yang kurang beruntung, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 34 dan 38. Meskipun terdapat retorika dari Negara, banyak anak-anak yang masih menghadapi hambatan dalam pendidikan dan mengalami penelantaran. Penting bagi Pemerintah untuk memprioritaskan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang gender, status sosial, agama, atau lokasi, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Konsep perluasan dan pemerataan pendidikan saling terkait erat, keduanya merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk menyediakan kesempatan dan sumber daya pendidikan yang komprehensif bagi semua individu,

terlepas dari lokasi geografis mereka. Memperluas pendidikan melibatkan fokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas di seluruh negeri, memastikan bahwa daerah yang paling terpencil sekalipun memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Di sisi lain, pemerataan pendidikan menekankan dedikasi pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial ekonomi atau lokasi geografis, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Prinsip ini menggarisbawahi keyakinan bahwa pendidikan harus menjadi hak universal, melampaui batas-batas kekayaan dan urbanisasi.

Secara nasional, pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di Indonesia, seperti mendedikasikan 20% APBN untuk pendidikan, menghapuskan biaya sekolah dasar, dan melaksanakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SMP dan SMA. sekolah menengah untuk mendukung siswa yang kurang beruntung. Namun, meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut, masih banyak siswa yang putus sekolah, khususnya

pada tingkat SMP dan SMA. Ada pula kemungkinan angka putus sekolah meningkat dari SD hingga SMP, meskipun pemerintah sudah berkomitmen terhadap Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Alasan utama di balik anak-anak meninggalkan pendidikannya sering kali disebabkan oleh keadaan ekonomi. Pendidikan adalah aspek mendasar dari keberadaan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang. Dipercaya secara luas bahwa pendidikan memainkan peran penting baik dalam kesejahteraan individu maupun kemajuan nasional. Perspektif ini semakin diperkuat dengan anggapan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Sebaliknya, ilmu ekonomi memandang manusia sebagai komponen integral dalam proses produksi (Revrison Baswir, 2003).

Pemerintah Indonesia secara konsisten memprioritaskan pendidikan sebagai program utama dalam upayanya melindungi dan membina generasi masa depan. Komitmen ini ditegaskan oleh tujuan mendasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang

menekankan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain untuk meningkatkan akses dalam dunia pendidikan pemerintah telah membuat berbagai program seperti beasiswa agar tidak memberatkan masyarakat.

Meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan masih rendah, terutama dalam hal tingkat melek huruf dibandingkan negara lain. Meskipun terdapat kemajuan dalam meningkatkan partisipasi siswa melalui berbagai langkah seperti peningkatan pembiayaan dan perbaikan tata kelola, kualitas pendidikan secara keseluruhan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan perluasan akses terhadap pendidikan dengan cara yang lebih adil dan selaras dengan standar internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan (Maulansyah et al., 2023).

Dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, sistem pendidikan Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan agar dapat

mencapai potensi maksimalnya. Kualitas pendidikan terhambat oleh kurangnya adaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata di seluruh negeri, dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersedia bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun. Tanpa pemerataan ini, siswa mungkin kekurangan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil, sehingga menyebabkan penurunan minat dan antusiasme belajar. Penting bagi semua siswa untuk mempunyai kesempatan untuk membuka dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Lanskap pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. Pertama, ketergantungan pada pembelajaran tradisional berbasis buku teks sejak tahun 60an dan 70an telah menghambat pengembangan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu, penggunaan metode ceramah satu arah yang lazim membatasi keterlibatan dan

pemahaman siswa. Terlebih lagi, belum meratanya pemerataan fasilitas pembelajaran, ketatnya peraturan seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta tidak adanya diskusi dan tanya jawab secara terbuka semakin menghambat mutu pendidikan. Selain itu, budaya menyontek yang merajalela, baik di kalangan siswa maupun guru, melemahkan integritas sistem pendidikan. Secara keseluruhan, mengatasi permasalahan ini sangatlah penting dalam meningkatkan standar pendidikan di Indonesia.

Sejumlah penelitian yang dilakukan secara global secara konsisten menyoroti peran penting profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun program sertifikasi guru telah dilaksanakan di negara kita selama lebih dari 15 tahun, efektivitas inisiatif ini belum dievaluasi secara komprehensif di tingkat nasional dengan menggunakan metode acropass. Kurangnya evaluasi menghambat kemampuan kita untuk mengukur dampak program terhadap peningkatan kompetensi guru, kinerja, dan pada akhirnya hasil belajar siswa. Sebaliknya, hasil tes

tahunan menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat negara dengan kemajuan kualitas pendidikan terendah di seluruh dunia.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlunya Supervisi akademik berfungsi untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar dengan memberikan bimbingan kepada pendidik dan meningkatkan pengembangan profesional mereka. Hal ini mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi praktik pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pendidikan, dan mengevaluasi keberhasilan operasional sekolah secara keseluruhan. Dengan memberikan umpan balik dan dukungan langsung, supervisi akademik mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik pendidikan (Yusak, 1998).

Mencapai pemerataan pendidikan merupakan isu penting, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini mencakup memastikan akses yang setara terhadap kesempatan pendidikan dan keadilan dalam distribusi pendidikan di masyarakat. Akses yang sama terhadap pendidikan memastikan bahwa semua individu usia sekolah

mempunyai kesempatan untuk menerima pendidikan, sedangkan akses yang adil berarti semua kelompok dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan.

Memastikan akses yang adil terhadap pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sangat penting dalam memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar dan sukses. Perluasan dan pemerataan sumber daya pendidikan sangat penting untuk mendorong kesetaraan di antara lulusan dari berbagai tingkat pendidikan. Komitmen terhadap kesetaraan dalam pendidikan juga memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Mengingat kebutuhan mendesak untuk menjamin pemerataan akses dan meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan zonasi pendidikan. Kebijakan ini dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut karena bertujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan menstandarisasi

kualitas pendidikan. Melalui penerapan kebijakan ini, bercita-cita untuk menciptakan lanskap pendidikan yang lebih adil. Pentingnya untuk memprioritaskan pemerataan pendidikan, karena pemerataan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang siap menghadapi tantangan dan bersaing dalam skala global.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan pendidikan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua sekolah, terutama sekolah-sekolah berkualitas rendah, memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Menerapkan program zonasi yang mencakup siswa dengan berbagai kemampuan akan menumbuhkan lingkungan belajar kolaboratif, mendorong siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan suasana yang lebih kompetitif, dimana siswa termotivasi untuk berprestasi dan mengembangkan bakatnya.

D. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia secara konsisten memprioritaskan pendidikan sebagai program utama dalam upayanya melindungi dan membina generasi masa depan. Komitmen ini ditegaskan oleh tujuan mendasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain untuk meningkatkan akses dalam dunia pendidikan pemerintah telah membuat berbagai program seperti beasiswa agar tidak memberatkan masyarakat.

Standar pendidikan di negara kita saat ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kemajuan pendidikan harus selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang secara profesional agar dapat membimbing siswa secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Kesetaraan pendidikan mencakup lebih dari sekedar

kesetaraan akses terhadap kesempatan pendidikan; hal ini juga memerlukan perlakuan dan dukungan yang adil bagi semua siswa untuk memaksimalkan potensi akademik mereka. Penting untuk memastikan pemerataan pendidikan, karena hal ini merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi tantangan dan bersaing dalam skala global.

DAFTAR PUSTAKA

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.

Revrisond Baswir. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Yusak, B. (1998). *Adminitrasi pendidikan*. Pustaka Setia.

Jurnal :

Ginting, E. V., Ginting, R. R., Hasibuan, R. J., & Perangin-angin, L. M. (2022). Analisis faktor tidak meratanya pendidikan di SDN 0704 sungai korang. Universitas Negeri Medan) *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(4).

Hakim, L. (2016). *Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1).

Maulansyah, R., Febrianty, D., & Asbari, M. (2023). Peran Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Penting dan Genting!. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5), 31-35.

Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44-53.